

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya diadakannya pemilu merupakan hal yang sangat tepat dan berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara demokratis. Dalam menganut sistem demokrasi, maka partisipasi politik dari masyarakat sangat dibutuhkan. Menurut Liando (2016) menjelaskan bahwa pemilihan umum telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme yang luas dalam sistem politik di negara-negara demokratis. Masyarakat merupakan tokoh utama dalam proses penyelenggaraan pemilu dengan memberikan peranan berupa partisipasi masyarakat dalam proses penentuan pemimpin baik yang berada di pemerintahan pusat maupun di daerah melalui proses pemilihan yang dibuat di negara Indonesia (Nababan, Pinem dan Purba, 2019).

Berdasarkan penjabaran Sulistyو (2019) melalui *media kantor staff Presiden* menyatakan bahwa pemilu pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 yang mencapai 91,4 persen tingkat partisipasi masyarakat. Pada masa orde baru tahun 1971, tingkat partisipasi mencapai 96,6 persen. Tahun 1977 dan 1982 mencapai 96,5 persen. Pada tahun 1987 partisipasi mencapai 96,4 persen, tahun 1992 mencapai 95,1 dan pada akhir masa orde baru tahun 1997 partisipasi mencapai 93,6 persen. Setelah dilakukan revisi terkait Undang-Undang Politik dan Undang-Undang

Pemilu partisipasi pada tahun 1999 mencapai tingkat 92,6 persen dan pada tahun 2004 turun menjadi 84,1 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap pemilihan umum partisipasi pemilih mengalami penurunan dari pemilu tahun tersebut ke tahun berikutnya di Indonesia.

Partisipasi politik menurut Budiardjo (2009) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih seorang pemimpin baik itu di dalam negara, daerah maupun wakil-wakil yang akan duduk di dewan perwakilan baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Iskandar (2017) mengemukakan dua asumsi terkait partisipasi yaitu pertama, partisipasi politik adalah bentuk dukungan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul dari adanya keterbukaan dan kesediaan menerima kebijakan walaupun dengan acuh atau apriori daripada terjadi penolakan secara langsung. Kedua, bentuk partisipasi yang diberikan sebagai hal penting untuk mencapai suatu kebijakan atau program yang berorientasi pada pencapaian kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dalton (2009) partisipasi politik terdiri dari lima dimensi yaitu pemberian suara dalam pemilu (*voting*), keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*), kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protest*).

Penurunan partisipasi pada masyarakat bukan hanya berakhir di tahun 2004. Namun, pada tahun 2009 partisipasi politik pada pemilu presiden turun menjadi 72,09 % dan pada tahun 2014 sebanyak 69,58 %, Purnamasari (dalam Solihah, 2018). Menurut Viryan (*Kompas.com*, 2019) bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat di pemilu 2019 menjadi 81 %. Hasil pada tahun 2019 menambah jumlah angka partisipasi yang sebelumnya mengalami penurunan partisipasi. Ketidaktepatan angka partisipasi di setiap pemilihan umum ternyata menambah angka non partisipan di sebuah pemilihan.

Hal menarik ketika melihat profil pemilih pada tahun 2019 melalui data *Badan Pusat Statistik* (BPS) menyebutkan ada 192,8 juta DPT dan luar negeri terdaftar pada pemilu 2019. Berdasarkan proyeksi *Badan Pusat Statistika* (BPS), jumlah pemilih yang berusia 17-35 tahun sebanyak 40 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok milenial yang mendominasi pemilu tahun 2019. Jenkins, dkk (dalam Nurfitri, 2018) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik (secara global) menunjukkan penurunan, khususnya pada kelompok usia muda, baik di negara maju maupun berkembang pada awal tahun 2000-an.

Menurut Yuningsih dan Warsono (2014), menjelaskan bahwa pemilih yang berada di Indonesia dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih rasional yaitu pemilih yang benar-benar memilih berdasarkan penilaiannya dan analisis secara mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional yaitu

pemilih yang masih idealis dan tidak mengenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yaitu pemilih yang baru pertama kali memilih dikarenakan usia mereka tersebut baru memasuki usia pemilih.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD pada pasal 19 ayat 1 berbunyi “warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genar berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih” dan pada pasal 19 ayat 2 berbunyi “warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih”. Pada penelitian ini berfokus pada pemilih pemula yang dapat disimpulkan dari pernyataan sebelumnya yaitu pemilih yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah namun belum pernah memilih dalam pemilu sebelumnya dan berwarga negara Indonesia.

Pada kasus yang berada di Indonesia Sodikin, dkk (dalam Perangin-angin dan Zainal, 2018) mencatat bahwa jumlah *non-voter* atau golput yang terjadi didominasi oleh kaum muda dan meningkat dari pemilu sebelumnya ke pemilu selanjutnya seperti pada pemilu tahun 1999 jumlah *non voter* kaum muda sebanyak 10,21%, pemilu 2004 sebanyak 23,34% dan pemilu 2009 39,10%. Berdasarkan data dari KPU (dalam Liandini, 2020) menjelaskan untuk pemilu tahun 2019 salah satunya di Sulawesi Selatan sebanyak 20-30 % dari 217.040 adalah pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan *non voter* yang terjadi dan didapatkan bahwa kenaikan angka *non voter* tersebut karena

minimnya pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula akan pentingnya hak suara. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Renciansyah (2015) menjelaskan bahwa mahasiswa yang termasuk dalam kategori pemilih pemula memilih masih memikirkan kepentingan pribadi dan masih muda dipengaruhi oleh orang-orang terdekat saat kegiatan pemilu.

Menurut Tinuntung (2013) adanya peningkatan tingkat non partisipan yang terjadi peran pemilih pemula seharusnya sangat diperlukan untuk mendominasi di kegiatan pemilu. Lebih lanjut, hal ini mengingat pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke arah mana harus memilih. Selain itu, adanya penghambat berupa ketidaktahuan dalam lingkup politik menjadikan seorang pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih mengutamakan pemikiran jangka pendek.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa, 13 Oktober 2020 sampai hari Kamis, 15 Oktober 2020. Wawancara dilakukan pada 11 pemilih pemula yang berusia 17-20 tahun dan belum pernah memilih dalam sebuah pemilu. Hasil wawancara menunjukkan pada aspek pemberian suara dalam pemilu (*voting*), 11 pemilih pemula bersedia untuk memberikan hak suaranya pada saat pemilu. Pada aspek keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*), 8 pemilih pemula mengakui tidak terlalu mengikuti bahkan tidak tertarik dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dalam pemilu dan 3 lainnya mengikuti kegiatan

kampanye yang diselenggarakan tersebut. Pada aspek menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*), terdapat 8 pemilih pemula tidak tertarik pada suatu partai politik dan 3 pemilih pemula tertarik pada partai politik. Dalam hal mengambil andil menjadi bagian dari partai politik atau suatu kelompok kepentingan hanya ada 2 orang dari 11 orang tersebut yang melakukannya dan menurut 11 pemilih pemula tersebut bahwa kedudukan seseorang dalam sebuah partai politik atau suatu kelompok kepentingan dapat berpengaruh pada keikutsertaan seseorang dalam memilih pasangan calon.

Pada aspek mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*), hanya ada 1 pemilih pemula yang melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah dan 10 pemilih pemula menyatakan tidak menjalin hubungan tersebut. Pada aspek kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protest*), 4 dari 11 pemilih pemula pernah mengkritik pemerintah melalui diskusi dengan teman atau keluarga, mengomentari di media sosial milik pemerintah, membuat postingan di media sosial pribadi dan mengikuti demo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 11 pemilih pemula dapat disimpulkan bahwa pada aspek pemberian suara dalam pemilu (*voting*) terdiri dari 11 pemilih pemula atau semua subjek yang diwawancarai, aspek keikutsertaan dalam kampanye politik (*campaign activity*) diikuti oleh 3 pemilih pemula, aspek menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*communal activity*) diikuti oleh 3 pemilih

pemula, aspek mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*contacting personal on personal matters*) terdapat 1 pemilih pemula, dan pada aspek kritik terhadap kebijakan pemerintah (*protest*) pernah dilakukan oleh 4 pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pada pemilih pemula masih rendah. Seharusnya, pemilih pemula sebagai generasi penerus bangsa memiliki partisipasi politik yang tinggi dengan melakukan partisipasi secara langsung untuk mendapatkan keuntungan dari suatu kelompok, seperti mengikuti kegiatan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu atau kegiatan kampanye, mengikuti diskusi dengan pemerintah dan melakukan protes kepada pemerintah, Davis (Zaenulmillah, 2017).

Partisipasi politik adalah hal yang penting pada negara demokrasi seperti Indonesia, sehingga dapat mendukung adanya pelaksanaan pemilu. Partisipasi politik memberikan sebuah kesempatan kepada warganya dalam menyampaikan informasi kepada para pejabat pemerintah mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan berupa keprihatinan terkait dengan kondisi dan harapan sebuah wilayah serta menekan pemerintah untuk menanganinya. Kesempatan yang diberikan ini dapat menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak untuk dapat mengekspresikan pandangan dan sikap setiap individu terhadap segala sesuatu yang terjadi di ruang publik atau kepentingan diri sendiri dengan menaruh harapan bahwa pejabat pemerintah mengetahui dan merespon hal tersebut (Fitriah, 2014).

Pada penelitian sebelumnya, partisipasi politik berkorelasi dengan berbagai hal seperti sosialisasi politik. Pada penelitian yang telah dilakukan Apriani (2015) menunjukkan adanya hubungan positif sosialisasi politik dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) Walikota 2012 Kota Tanjungpinang, bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik. Sebaliknya, jika tingkat sosialisasi politik rendah maka tingkat partisipasi politik rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, dkk (2013) menunjukkan adanya hubungan positif kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa, yaitu semakin tinggi kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik. Sebaliknya, tingkat kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi rendah maka tingkat partisipasi politik rendah. Berdasarkan dua penelitian sebelumnya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi secara positif oleh tingkat sosialisasi politik, kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi.

Menurut Verba dkk (1997) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu 1) Referensi yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi terdiri dari waktu dan pengetahuan. 2) Keterlibatan psikologis terdiri dari minat dan efikasi. 3) Jaringan rekrutmen yang membawa individu ke politik terdiri dari gerakan sosial dan kelompok keagamaan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, peneliti memilih faktor keterlibatan psikologis yaitu efikasi untuk dijadikan sebagai

faktor dalam penelitian yang dilakukan ini, karena efikasi yang tinggi atas kemampuan individu untuk berperan dalam sebuah sistem politik maupun dapat mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah mampu mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik secara aktif (Fitriah, 2014). Selain itu, Budiardjo (2007) menyatakan bahwa anggota masyarakat termasuk didalamnya pemilih pemula yang berpartisipasi dalam proses politik seperti pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama yang dilakukan tersebut kepentingan pun akan tersalur atau diperhatikan dan dapat memengaruhi bagian berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau dengan kata lain bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam bentuk partisipasi mempunyai efek politik yang berupa kemampuan untuk mencapai tujuan didalamnya (*political efficacy*). Berdasarkan penjelasan diatas maka teori utama yang digunakan oleh peneliti adalah teori Fitriah (2014) yang menjelaskan mengenai *political efficacy* terhadap politik pada mahasiswa pemilih pemula.

Menurut Schulz (2005), efikasi politik adalah kebutuhan individu dalam mencapai kestabilan demokrasi dan memberikan keyakinan pada individu untuk mempengaruhi tindakan dari pemerintah. Menurut Sharoni (2012), istilah sederhana dari efikasi politik adalah sebuah hal yang menggambarkan motivasi seseorang untuk terlibat dalam sebuah masalah politik dan apakah negara percaya dengan pendapatnya dalam lingkup politik tersebut. Motivasi ini dapat membantu seseorang untuk mewujudkan

keinginan yang besar dari dalam diri kepada seorang pemimpin yang akan terpilih dalam sebuah pemilu.

Menurut Schulz (2005) efikasi politik terdiri dari dua dimensi yaitu efikasi politik internal yang dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki seseorang mengenai kemampuan dirinya sendiri dan efikasi politik eksternal dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi oleh diri individu dengan lingkungannya. Menurut Wright (Schulz, 2005), tingkat efikasi politik yang tinggi di antara warga negara biasanya dipandang sebagai sebuah hal yang diinginkan untuk stabilitas demokrasi karena dalam masyarakat demokratis modern warga negara harus merasa bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukannya serta dapat mempengaruhi tindakan pemerintah di sebuah Negara tertentu. Oleh karena itu, dari uraian hasil penelitian dan fakta-fakta yang telah disajikan maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula.

Partisipasi politik berkorelasi dengan berbagai variabel lainnya, salah satunya adalah efikasi politik. Pemilih pemula akan berpartisipasi politik karena adanya keyakinan di dalam dirinya untuk ikut andil menjadi bagian dalam sebuah rangkaian kegiatan pemilu. Jika seorang pemilih pemula meyakinkan dirinya untuk berpartisipasi politik maka akan memberikan dampak pada hasil dari pelaksanaan pemilu tersebut. Seseorang yang dapat memanfaatkan segala proses pemilihan dengan sebaik-baiknya dapat berpartisipasi untuk memberikan peran dalam setiap pengambilan kebijakan

hingga pada proses penilaian kebijakan pemerintah berhasil atau tidak. Efikasi politik merupakan bagian dari konsep *self-efficacy* yang berada dalam konteks bahasan dari perilaku secara spesifik di bidang politik (Fitriah, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa efikasi politik memiliki dampak yang positif terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Blimbing Kota Malang (Zaenulmillah, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah apakah ada hubungan antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk bidang ilmu psikologi secara umum dan secara khusus pada psikologi sosial serta psikologi politik. Selain itu, menambah referensi dalam perkembangan teori psikologi dibidang politik seperti konsep psikologi politik tentang efikasi politik dan juga partisipasi politik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan efektif kepada peneliti, praktisi atau pemilih pemula lainnya mengenai konsep efikasi politik yang berpengaruh pada partisipasi politik.